PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/5534/414.202/2023
NOMOR : 050/ 556 /414.050/2023
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2023

TENTANG
PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/5534/414.202/2023
NOMOR : 050/ 556 /414.050/2023
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
   Jabatan : BUPATI TUBAN
   Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban
2. a. Nama : H. M. MIYADI, S.Ag., MM
   Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
   Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
   b. Nama : SUGIANTORO, A.Md
   Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
   Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

d. Nama : IMAM SUTIONO, SH
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Tuban, 6 September 2023

BUPATI TUBAN	PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN
Selaku,	Selaku,
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.	H. M. MIYADI, S.Ag. MM KETUA
	SUGIANTORO, A.Md WAKIL KETUA
	ANDHI HARTANTO, S.Pd WAKIL KETUA
	IMAM SUTIONO, SH WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) I-1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) I-3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) I-3

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH **II-1**

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-1

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah II-5

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN **III-1**

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN III-1

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBD III-3

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **IV-1**

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023 ..... IV-1

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 ..... IV-4

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH **V-1**

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah V-1

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. V-3

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH **VI-1**

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN **VII-1**

BAB VIII PENUTUP **VIII-1**

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak Peraturan Perundang-undangan yang sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023 telah berjalan memasuki paruh tahun kedua dengan berbagai dinamika yang telah menyertainya, mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi Pendapatan, Belanja maupun pada sisi Pembiayaan Daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya.

Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 28 Desember 2022 dan pelaksanaannya hingga akhir semester kedua, ditetapkan beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2023 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan perubahan terakhir melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) menyesuaikan hasil Desk dengan Kementerian/Lembaga teknis dan penyesuaian Nomenklatur kegiatan/sub kegiatan, perubahan pagu Anggaran pendapatan dan belanja DBHCHT serta perubahan nomenklatur dan petunjuk teknis penggunaannya, perubahan pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur, penyesuaian sub kegiatan berdasarkan sumber dana dan penggunaannya sebagai tindak

lanjut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, yakni DAU penggajian PPPK, DAU Pendanaan Kelurahan, DAU Pendidikan, DAU Kesehatan dan DAU Pekerjaan Umum, serta tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 17 April 2023 Nomor S-50/PK/2023 perihal Pemberitahuan Penyampaian Peraturan Bupati/Wali Kota Mengenai Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) per Desa dan Evaluasi Pemenuhan ADD Tahun 2023. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, terhadap adanya perubahan tersebut juga telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Penyesuaian kebijakan tersebut dan hasil evaluasi pembangunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 serta perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2023, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah;
3. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menentukan perubahan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023; dan
3. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tuban adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas local di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Kondisi ekonomi global pasca pandemi ini akan berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi nasional hingga ke daerah. Oleh karenanya dalam penyusunan Perubahan RKPD maupun Perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 ini dibutuhkan sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah (kabupaten) dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga penentuan arah kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Tuban benar-benar tepat sasaran dan solutif ditengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Mencermati kinerja perekonomian di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2023 tercatat sebesar 5,03%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi tetap kuat didukung oleh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68%, ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54%, seiring naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Capaian Makro Nasional 2022, sasaran dan asumsi makro nasional tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Sasaran dan Asumsi Makro Nasional 2023-2024

Indikator	**2023**	**2024**
	Proyeksi	**Proyeksi**
Pertumbuhan Ekonomi (*%, yoy*)	5,5-6,3	5,5-6,5
Inflasi *(%, yoy)*	1,5-3,5	1,5-3,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	5,82-8,16	5,67-8,24
Nilai Tukar (USD/IDR): average	13.900-14.850	13.900-15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD per barel)	60-70	60-70
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	570-735	534-722
Lifting Gas (BOE/hari)	1.223-1.336	1.228-1.324

Sumber: Bappeda Litbang Kab.Tuban, P-RKPD 2023 dan bps.go.id

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan ekonomi daerah juga harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, perlu dipahami prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, diantaranya :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pemerataan infrastruktur di wilayah selatan dan kepulauan. Peningkatan infrastruktur untuk sistem pengendalian banjir wilayah utara Provinsi;
2. Meningkatkan nilai tambah pertanian;
3. Penurunan tingkat kemiskinan wilayah perdesaan melalui peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan pendapatan;
4. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas terutama untuk kebutuhan industri;
5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk penurunan AKI, AKB, Stunting dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular lainnya.

Sedangkan Arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebagaimana disajikan dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi 3,42 - 5,12;
2. Indeks Theil 0,32040 -0,31463;
3. Persentase Penduduk Miskin 10,96 - 10,39;
4. Indeks Gini 0,3682 – 0,3677;
5. Indeks Pembangunan Gender 90,92 -91,87;
6. Indeks Pembangunan Manusia 72,58-73,07;
7. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 5,42 - 3,83;
8. Indeks Reformasi Birokrasi 77,76 - 78,71;
9. Indeks Kesalehan Sosial 66,38 - 69,14;
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,35 - 64,40;
11. Indeks Risiko Bencana 117,26-116,26;

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Daerah Kabupaten Tuban adalah perkembangan ekonomi Daerah, Nasional dan Global. Perkembangan ekonomi Regional dan Global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi Daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi Daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Kondisi ekonomi Global pasca pandemi ini akan berpengaruh pada arah kebijakan ekonomi Nasional hingga ke Daerah. Oleh karenanya dalam penyusunan Perubahan RKPD maupun Perubahan KUA dan PPAS tahun 2023 ini dibutuhkan sinergitas kebijakan makro ekonomi Daerah (Kabupaten) dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, sehingga penentuan arah kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Tuban benar-benar tepat sasaran dan solutif ditengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*.

Yang menjadi dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban adalah perkembangan ekonomi Daerah, Nasional dan Global. Perkembangan ekonomi Regional dan Global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi Daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi Daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara agar pembangunan ekonomi berhasil adalah dengan memadukan kekuatan potensi segitiga ekonomi Bangsa yaitu mengembangkan lapangan usaha kategori pertanian, melaksanakan industrialisasi dan memajukan lapangan usaha kategori jasa-jasa. Sehingga pengembangan ketiga kategori lapangan usaha di Kabupaten Tuban yaitu lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha kategori industri pengolahan dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor saling memperkuat satu sama lain. Berkembangnya lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang kuat akan memberikan landasan bagi pengembangan industri berbahan baku komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi. Industri pengolahan yang tumbuh pesat akan menyerap produksi komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus meningkatkan volume perdagangan secara simultan diikuti pengembangan kategori jasa-jasa serta lapangan usaha kategori yang lain.

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Daerah, tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tuban di tahun 2023 ditetapkan yaitu: **“Peningkatam Kualitas dan Produktivitas SDM Seutuhnya Yang Didukung Dengan Kualitas Infrastruktur untuk Reformasi Ekonomi Berkelanjutan”.**

Rumusan tema di atas dapat dijelaskan bahwa komitmen peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia harus dilakukan secara berkelanjutan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas sebagai dasar untuk reformasi ekonomi secara berkelanjutan. Tema ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan harmonisasi kualitas SDM dan kualitas Infrastruktur dan ekonomi Daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tuban yang mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Timur serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan Nasional, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana.
2. Penguatan berkelanjutan reformasi struktural perekonomian yang berketahanan, berdaya, dan bernilai tambah.
3. Peningkatan kualitas pembangunan Manusia melalui penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan ketrampilan teknis Pelaku Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta perlindungan sosial yang produktif.
4. Perwujudan kualitas dan kinerja ASN sesuai tuntutan ekologis struktur yang sederhana, tata kelola yang terintegrasi berbasis elektronik, dan transformasi pelayanan yang adaptif.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Daerahnya khususnya dalam hal pengelolaan keuangan Daerah.

Arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Tuban diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi Daerah, pengalokasian Anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk Masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan Masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan Daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan Daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tuban dan penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keuangan Daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan Daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan Daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu Daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan Daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan Daerah yang berasal dari Pendapatan Daerah pada APBD maupun sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi maupun Swadaya Masyarakat dan Kontribusi Pelaku Usaha melalui *Coorporate Social Responsibility (CSR*).

Penyusunan kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun Daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan Pendapatan Daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi Belanja Daerah. Perubahan kebijakan pendapatan pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2022. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan Daerah pada

Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023 antara lain dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian penerimaan Pendapatan Daerah karena perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun perubahan estimasi, khususnya karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut.
3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan Belanja Daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.
4. OPD penghasil agar lebih mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Keselarasan antara visi misi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten adalah sesuatu hal yang mutlak dilakukan untuk menjamin dilakukan untuk menjamin sinkronisasi dan sinergitas pada seluruh elemen stake holder pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dibawah ini disajikan tabel-tabel data sebagai berikut:

1. Tabel 2.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.
2. Tabel 2.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.
3. Tabel 2.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.

LAMPIRAN 2.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)		
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase ketersediaan pangan masyarakat		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Prosentase Koperasi Sehat		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
			Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Prosentase Koperasi Sehat		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Prosentase SDM Koperasi Yang Berkualitas		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Prosentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Prosentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Wirausaha		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Persentase peningkatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Cakupan pengendalian pelaku usaha		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Presentase jumlah pemohon ijin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Jumlah Kawasan yang Dipantau		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
			Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
			Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
			Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/Dasaran		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
			Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang		
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%)		
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**				
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Persentase Calon Transmigran yang ditempatkan		
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akip Perangkat Daerah		
				KECAMATAN MONTONG	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Presentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi		
				KECAMATAN PALANG	
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar		
				DINAS PENDIDIKAN	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan		
				DINAS PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan		
				DINAS PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
			Persentase Pelayanan Perijinan Operasional Pendidikan		
				DINAS PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Meningkatnya kualitas performa displin kepegawaian		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Nilai AKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase indikator Mutu Nasional RS (RS Dr. R. Koesma)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kematian Bayi(AKB)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Angka Kematian Ibu (AKI)		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase balita stunting		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase desa ODF		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase fasyankes terakreditasi		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase Keluarga Sehat		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standard (RSUD dr. R. Koesma)		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase fasyankes dengan tenaga kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			0PersentaseKegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)		
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang telah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel		
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita 25-49 tahun		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Peningkatan Prestasi Olahraga		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
			Presentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Olahraga		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
			Presentase Peningkatan Prestasi Olahraga		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP perangkat daerah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
			Prosentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
			Prosentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				SEKRETARIAT DAERAH	
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Prosentase ASN dengan Evaluasi Kinerja Optimal		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Rasio Pegawai Fungsional % (PNS tidak termasuk Guru dan Kesehatan) (rasio)		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				KECAMATAN KEREK	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah, Penganggaran,dan Evaluasi yang tersusunan (dokumen)		
				KECAMATAN KEREK	
			NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH		
				KECAMATAN MERAKURAK	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				KECAMATAN PALANG	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Dana yang dibutuhkan		
				KECAMATAN JENU	
			Nilai Akip Perangkat Daerah		
				KECAMATAN JENU	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Jumlah Potensi / Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipantau		
				KECAMATAN JENU	
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola (objek)		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Meningkatnya Jumlah Dokumen Sejarah yang Terinventarisir		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya		
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Akip Perangkat Daerah		
				KECAMATAN JENU	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Potensi Konflik yang telah ditangani		
				KECAMATAN KEREK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Indikator Mutu Nasional RS		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Presentase yankes yang terakreditasi		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Presentasi pemenuhan sarana dan prasarana sesuai rencana		
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Jumlah dokumen perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kabupaten/Kota		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Persentase pembangunan bangunan yang sesuai dengan perencanaan/ketentuan RTH		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
				KECAMATAN JATIROGO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Dana yang dibutuhkan		
				KECAMATAN JENU	
			Nilai Akip Perangkat Daerah		
				KECAMATAN JENU	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi		
				KECAMATAN MERAKURAK	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Presentase Pengaduan gangguan trantibum yang di tindak lanjuti		
				KECAMATAN TUBAN	
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase pelanggaran gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Persentase Pelanggaran Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Presentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Ketepatan waktu tanggap bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Prosentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Prosentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Prosentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Prosentase wilayah dengan kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			Waktu Tanggap (response time) penanganan kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Jumlah masyarakat yang berbudaya lingkungan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Pengaduan gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti		
				KECAMATAN KEREK	
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Perekaman KTP elektronik		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Perekaman KTP Elektronik		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			''Kepemilikan akta kelahiran		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase Penyajian Data Kependudukan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Tingkat Arsip Inaktif dan Statis yang diolah		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Jumlah rancangan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
				SEKRETARIAT DAERAH	
			prosentase rancangan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan		
				SEKRETARIAT DAERAH	
			Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Jumlah Inovasi yang Dihasilkan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				KECAMATAN JATIROGO	
				KECAMATAN BANGILAN	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				KECAMATAN BANCAR	
				KECAMATAN SENORI	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	
			Nilai Akip Perangkat Daerah		
				KECAMATAN JENU	
			0NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH		
				KECAMATAN MERAKURAK	
			NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH		
				KECAMATAN MERAKURAK	
			Nilai Akip Perangkat Daerah		
				KECAMATAN RENGEL	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
				KECAMATAN TUBAN	
				KECAMATAN PLUMPANG	
			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		
				KECAMATAN WIDANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan		
				KECAMATAN BANCAR	
			Persentase Penyelesaian atas permohanan Pelayanan publik kecamatan (%)		
				KECAMATAN SENORI	
			Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%)		
				KECAMATAN SENORI	
			Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan		
				KECAMATAN KEREK	
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN MERAKURAK	
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)		
				KECAMATAN RENGEL	
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan		
				KECAMATAN TUBAN	
			Indeks Pelayanan Publik		
				KECAMATAN PLUMPANG	
			Presentase Penyelesaian atas Permohonan Pelayanan Publik Kecamatan		
				KECAMATAN WIDANG	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi		
				KECAMATAN BANGILAN	
			persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi		
				KECAMATAN BANCAR	
				KECAMATAN SENORI	
			Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi		
				KECAMATAN SENORI	
			Presentase Desa Mengisi Buku Administrasi Keuangan Desa Sesuai dengan Ketentuan0		
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	
			Presentase Desa yang memiliki BUMDes		
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	
			Prosentase Desa dengan pningkatan nilai Indeks Ketahanan Ekonomi		
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	
			Persentase desa dengan peningkatan nilai ketahanan ekonominya		
				KECAMATAN SEMANDING	
			Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi		
				KECAMATAN WIDANG	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti		
				KECAMATAN JATIROGO	
				KECAMATAN BANGILAN	
				KECAMATAN BANCAR	
			Prosentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti		
				KECAMATAN SENORI	
			Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN SOKO	
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti		
				KECAMATAN MERAKURAK	
			Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti		
				KECAMATAN SEMANDING	
			Prosentase Pengaduan Gangguan Trantibum yang ditindak lanjuti		
				KECAMATAN PLUMPANG	
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		
				KECAMATAN PALANG	
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti		
				KECAMATAN WIDANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani		
				KECAMATAN BANCAR	
				KECAMATAN SENORI	
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Di tindak Lanjuti		
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu		
				KECAMATAN JATIROGO	
				KECAMATAN BANCAR	
				KECAMATAN SENORI	
				KECAMATAN MERAKURAK	
			Jumlah Desa yang difasilitasi		
				KECAMATAN PLUMPANG	

LAMPIRAN 2.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
53	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;**					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	249.452.450	294.116.750
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
			Prosentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	183.724.000	183.724.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
			Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	61.160.700	384.789.700
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
			Prosentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Wirausaha			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	420.219.854	421.149.803
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.663.127.343	6.518.588.197
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
			Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	328.500.000	475.800.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
			Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	625.400.000	625.400.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
			Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	564.336.500	411.018.000
			Persentase peningkatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	564.336.500	411.018.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
			Cakupan pengendalian pelaku usaha			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	416.065.250	416.065.250
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
			Presentase jumlah pemohon ijin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal			
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	166.495.000	172.787.500

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	102.280.600	69.257.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Presentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Olahraga			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	249.450.000	1.546.000.000
			Presentase Peningkatan Prestasi Olahraga			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	249.450.000	1.546.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.293.900.000	2.230.700.000
			Prosentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.293.900.000	2.230.700.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	597.425.000	793.425.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	408.331.400	324.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
			Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.731.240.000	2.172.240.000
			Prosentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.731.240.000	2.172.240.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sebelum Dipotong			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.200.000.000	4.610.952.856
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sesudah Dipotong			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.200.000.000	4.610.952.856
			Persentase prasarana pertanian yang digunakan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.200.000.000	4.610.952.856
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	263.707.000	263.707.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
			Persentase fasilitasi penanggulangan bencana			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	520.521.500	520.521.500
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
			Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	46.800.000	46.800.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	283.960.400	293.961.050
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
			Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	291.243.000	291.243.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
			Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	371.591.444	371.591.444
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan			
				SEKRETARIAT DAERAH	410.000.000	232.070.350
			Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam			
				SEKRETARIAT DAERAH	410.000.000	232.070.350
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	612.141.000	505.854.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Akip Perangkat Daerah			
				KECAMATAN MONTONG	8.000.000	8.000.000
54	**PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur**					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Presentasi pemenuhan sarana dan prasarana sesuai rencana			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.270.400.000	5.544.998.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	27.369.611.179	22.108.951.967
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Rasio luas derah irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.990.516.120	37.118.151.954
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di wilayah kewenangan Kabupaten/Kota			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.096.275.047	70.149.362.555
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.622.128.834	14.013.905.634
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
			Presentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan Regional untuk menunjang tingkat layanan yang telah direncanakan			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.812.940.000	3.812.940.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.152.055.000	9.237.392.400
			Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.152.055.000	9.237.392.400
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	53.673.825.736	112.424.592.101
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
			Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	501.755.000	6.163.981.000
			Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	501.755.000	6.163.981.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
			Jumlah dokumen perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kabupaten/Kota			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.005.459.164	28.892.418.964
			Persentase pembangunan bangunan yang sesuai dengan perencanaan/ketentuan RTH			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.005.459.164	28.892.418.964
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	176.035.734.117	400.860.877.941
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.626.547.350	1.542.989.960
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.876.650	232.142.500
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.450.000.000	7.506.958.500
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani infrastrukturnya			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.450.000.000	7.506.958.500
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di luar kawasan kumuh			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.000.000	25.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas)			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	180.709.931.798	213.777.802.798
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				
			Prosentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya datas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000	0
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
			Penangan sengeketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000	10.470.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (Ratio/Ruas Jalan)			
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	71.475.000	1.135.412.600
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
			Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	7.008.249.250	7.168.244.250
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	7.008.249.250	7.168.244.250
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
			Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.221.041.450	2.415.210.650
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
			Jumlah Kawasan yang Dipantau			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	117.512.700	117.512.700
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
			Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.449.297.520	2.450.715.220
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Persentase sarana pertanian yang digunakan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	91.236.500	91.236.500
			Persentase sarana pertanian yang digunakan sesuai standar			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.649.283.529	4.518.911.529
			Persentase sarana ppertanian yang digunakan sesuai standar			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	91.236.500	91.236.500
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sebelum Dipotong			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	20.130.333.877	18.107.508.762
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sesudah Dipotong			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	20.130.333.877	18.107.508.762
			Persentase prasarana pertanian yang digunakan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	20.130.333.877	18.107.508.762
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	37.958.350	107.958.350
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Persentase kelompok tani kelas utama			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.172.717.000	2.972.717.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	45.526.000	45.525.950
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
			Persentase alatâ€"alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	305.740.000	305.740.000
			Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang			
				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	305.740.000	305.740.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.959.288.000	1.148.383.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	17.024.800	16.227.300
			Dana yang dibutuhkan			
				KECAMATAN JENU	54.749.400	80.324.800
			Nilai Akip Perangkat Daerah			
				KECAMATAN JENU	252.934.980	296.808.720
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Dana yang dibutuhkan			
				KECAMATAN JENU	81.500.000	81.500.000
			Nilai Akip Perangkat Daerah			
				KECAMATAN JENU	81.500.000	81.500.000
55	**PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan**					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai			
				DINAS PENDIDIKAN	3.098.999.950	5.760.962.400
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				DINAS PENDIDIKAN	688.266.886.757	584.682.232.459
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah			
				DINAS PENDIDIKAN	169.545.658.690	183.609.686.957
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
				DINAS PENDIDIKAN	169.545.658.690	183.609.686.957
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar			
				DINAS PENDIDIKAN	169.545.658.690	183.609.686.957
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan			
				DINAS PENDIDIKAN	169.545.658.690	183.609.686.957
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
			Prosentase peningkatan pengembagan Kurikulum Muatan Lokal			
				DINAS PENDIDIKAN	272.834.000	147.231.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
			Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan			
				DINAS PENDIDIKAN	330.257.000	330.257.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.033.375.400	1.991.868.750
			Nilai AKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26.627.410.713	24.464.777.759
			Persentase indikator Mutu Nasional RS (RS Dr. R. Koesma)			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	165.791.010.000	224.840.967.146
			Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33.751.362.037	44.730.744.233
			Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33.751.362.037	44.730.744.233
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Angka Kematian Bayi(AKB)			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	43.158.680.593	48.641.892.354
			Angka Kematian Ibu (AKI)			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	43.158.680.593	48.641.892.354
			Indikator Mutu Nasional RS			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.044.700.000	8.179.245.000
			Persentase balita stunting			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	43.158.680.593	48.641.892.354
			Persentase desa ODF			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	43.158.680.593	48.641.892.354
			Persentase fasyankes terakreditasi			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	43.158.680.593	48.641.892.354
			Persentase Keluarga Sehat			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	43.158.680.593	48.641.892.354
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standard (RSUD dr. R. Koesma)			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.559.004.468	16.559.004.468
			Presentase yankes yang terakreditasi			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.044.700.000	8.179.245.000
			Presentasi pemenuhan sarana dan prasarana sesuai rencana			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.143.044.000	6.435.544.033
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Persentase fasyankes dengan tenaga kesehatan sesuai standar			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.887.771.900	2.377.534.600
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Memenuhi Syarat			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	544.172.950	515.245.450
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.682.537.057	7.596.272.929
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
			Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	463.737.350	625.338.300
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
			Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.330.888.492	8.523.042.476
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
			Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.691.829.150	16.793.053.007
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
			Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	161.849.000	161.849.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
			Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang Terpelihara			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	60.431.700	60.431.700
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
			0PersentaseKegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja			
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	41.202.000	114.805.050
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	4.546.426.900	5.497.418.429
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)			
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.641.145.450	1.612.900.600
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	419.160.500	419.160.500
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
			Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	349.237.600	393.257.600
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
			Rasio kekerasaan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	158.460.000	232.459.200
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
			Persentase pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	45.551.000	53.351.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
			Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	307.904.000	463.150.200
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
			Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	364.162.400	310.696.200
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	155.743.200	111.950.000
		PROGRAM PENATAAN DESA				
			Persentase Desa yang statusnya meningkat			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150.000.000	119.820.000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
			Persentase Peningkatan Kerjasama Desa			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	124.450.000	200.000.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang telah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.386.256.300	8.216.791.550
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Prosentase Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.273.743.900	1.309.683.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
				DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.450.396.794	1.343.599.294
			Nilai AKIP perangkat daerah			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.892.692.692	6.910.534.871
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.345.449.900	1.345.449.800
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
			Tingkat Arsip Inaktif dan Statis yang diolah			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.049.783.200	1.247.522.300
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	113.041.600	113.041.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	4.970.922.733	4.625.271.256
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
			Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%)			
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.760.723.700	5.102.128.119
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
			Persentase Calon Transmigran yang ditempatkan			
				DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	168.333.200	135.317.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	33.000.000	17.300.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN KEREK	12.300.000	18.250.000
56	**PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal**					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah			
				DINAS PENDIDIKAN	411.852.400	411.852.400
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
				DINAS PENDIDIKAN	411.852.400	411.852.400

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar			
				DINAS PENDIDIKAN	411.852.400	411.852.400
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan			
				DINAS PENDIDIKAN	411.852.400	411.852.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	174.268.050	100.000.050
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Presentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Olahraga			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	101.147.700	89.947.700
			Presentase Peningkatan Prestasi Olahraga			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	101.147.700	89.947.700
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
			Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola (objek)			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.573.325.800	1.321.212.800
			Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	266.400.000	266.400.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
			Persentase peningkatan jumlah pelaku kesenian daerah (%)			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	211.750.000	211.750.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
			Meningkatnya Jumlah Dokumen Sejarah yang Terinventarisir			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	97.000.000	97.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
			Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	83.450.000	83.450.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
			Jumlah museum yang dikelola			
				DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	801.400.000	801.400.000
57	**PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi**					
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Persentase ketersediaan pangan masyarakat			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	902.021.398	907.021.398
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase desa tahan pangan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	68.582.600	137.582.600
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
			Persentase keamanan pangan			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	153.636.350	153.636.350
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.541.108.290	628.212.120
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
			Persentase fasilitasi penanggulangan bencana			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	50.190.000	50.190.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	406.400.000	289.276.000
58	**PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup**					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.926.730.512	4.867.459.424
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Ketepatan waktu tanggap bencana			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.888.622.545	3.026.373.979
			Ketepatan waktu tanggap pasca bencana			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	920.040.000	1.012.311.000
			Prosentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.808.662.545	4.038.684.979
			Prosentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.808.662.545	4.038.684.979
			Prosentase wilayah dengan kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar			
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.808.662.545	4.038.684.979
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN TUBAN	2.975.000	2.975.000
59	**PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur**					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.818.546.971	11.168.740.707
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Pelanggaran Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.646.982.980	1.417.250.535
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4.359.189.800	4.732.067.179
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.646.982.980	1.417.250.535
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.071.669.370	1.286.669.370
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.596.707.046	9.139.378.091
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Perekaman KTP elektronik			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	108.000.000	108.000.000
			Perekaman KTP Elektronik			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.631.926.000	3.925.594.800
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.739.926.000	4.033.594.800
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
			''Kepemilikan akta kelahiran			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	225.324.100	196.844.100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	136.583.150	117.583.150
			persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	609.083.050	806.023.050
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
			Persentase Penyajian Data Kependudukan			
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52.725.000	52.725.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	30.667.067.741	24.238.884.897
				SEKRETARIAT DAERAH	34.164.384.762	42.947.363.007
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Jumlah rancangan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
				SEKRETARIAT DAERAH	32.120.561.723	38.708.844.034
			prosentase rancangan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				SEKRETARIAT DAERAH	32.120.561.723	38.708.844.034
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
			Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan			
				SEKRETARIAT DAERAH	1.107.073.100	1.559.955.226
			Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam			
				SEKRETARIAT DAERAH	1.107.073.100	1.559.955.226
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD			
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.794.302.000	2.366.328.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.812.133.295	7.654.232.079
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
			Prosentase ASN dengan Evaluasi Kinerja Optimal			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	408.519.850	359.623.000
			Prosentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.409.400.200	3.924.075.200
			Rasio Pegawai Fungsional % (PNS tidak termasuk Guru dan Kesehatan) (rasio)			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	705.416.550	727.678.550
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar % (PNS tidak termasuk Guru dan Kesehatan)			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.421.233.000	1.112.419.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Kesehatan)			
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.612.567.800	2.537.673.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN JATIROGO	3.232.946.504	2.996.005.170
				KECAMATAN BANGILAN	3.035.953.606	2.970.311.165
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN BANCAR	2.625.320.221	2.358.360.009
				KECAMATAN SENORI	3.507.188.328	3.036.086.353
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	3.141.732.108	2.577.259.155
			Nialai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN PARENGAN	13.500.000	21.900.000
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN PARENGAN	3.636.114.420	2.957.681.093

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN SOKO	3.435.534.926	3.064.816.066
			0NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH			
				KECAMATAN MERAKURAK	46.959.440	62.039.740
			NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH			
				KECAMATAN MERAKURAK	2.886.788.209	2.303.353.815
			Nilai Akip Perangkat Daerah			
				KECAMATAN RENGEL	2.513.708.340	1.877.488.675
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN RENGEL	376.182.809	459.332.809
			nilai AKIP Perangkat			
				KECAMATAN SEMANDING	163.405.735	170.017.935
			Nilai AKIP perangkat			
				KECAMATAN SEMANDING	45.293.840	61.043.840
			Nilai AKIP Perangkat			
				KECAMATAN SEMANDING	132.134.180	264.544.178
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN SEMANDING	5.771.037.119	4.772.143.226
			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN SEMANDING	38.565.000	38.565.000
			Nilai Akip Perangkat daerah			
				KECAMATAN TUBAN	444.524.610	586.430.163
			Nilai Akip Perangkat Daerah			
				KECAMATAN TUBAN	871.257.930	977.139.410
			Nilai AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN TUBAN	16.657.391.262	13.540.298.146
				KECAMATAN PLUMPANG	3.208.224.845	3.159.639.544
				KECAMATAN PALANG	4.175.381.073	3.445.669.178
			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			
				KECAMATAN WIDANG	2.903.272.091	2.728.609.025
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan			
				KECAMATAN JATIROGO	11.980.000	70.000.000
			Persentase penyelesaian atas perrmohonan pelaayaanan publik Kecamatan			
				KECAMATAN BANGILAN	14.276.000	57.791.000
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan			
				KECAMATAN BANCAR	12.000.000	84.425.000
			Persentase Penyelesaian atas permohanan Pelayanan publik kecamatan (%)			
				KECAMATAN SENORI	28.154.000	71.599.000
			Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan (%)			
				KECAMATAN SENORI	28.154.000	71.599.000
			Prosentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	12.745.000	12.745.000
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
				KECAMATAN PARENGAN	9.065.000	67.005.600
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kecamatan (PATEN)			
				KECAMATAN SOKO	16.800.000	89.225.000
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan			
				KECAMATAN MERAKURAK	7.875.000	65.875.000
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan (%)			
				KECAMATAN RENGEL	16.062.450	59.577.450
			Persentase penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan			
				KECAMATAN SEMANDING	156.566.855	209.302.663
			7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
				KECAMATAN TUBAN	65.000.000	65.000.000
			Nilai Indeks Presentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan			
				KECAMATAN TUBAN	11.388.550	40.698.550
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan			
				KECAMATAN TUBAN	833.379.866	827.701.537
			Indeks Pelayanan Publik			
				KECAMATAN PLUMPANG	20.100.000	78.120.000
			Persentase Penyelesaian atas pemohonan pelayanan publik kecamatan			
				KECAMATAN PALANG	89.500.000	144.690.000
			Presentase Penyelesaian atas Permohonan Pelayanan Publik Kecamatan			
				KECAMATAN WIDANG	11.802.970	11.802.970
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi			
				KECAMATAN JATIROGO	134.329.700	192.349.700
			Persentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi			
				KECAMATAN BANGILAN	184.946.500	228.461.500
			persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi			
				KECAMATAN BANCAR	104.385.900	162.325.900
				KECAMATAN SENORI	101.734.000	130.364.000
			Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi			
				KECAMATAN SENORI	101.734.000	130.364.000
			Presentase Desa Mengisi Buku Administrasi Keuangan Desa Sesuai dengan Ketentuan0			
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	132.161.200	188.818.700
			Presentase Desa yang memiliki BUMDes			
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	132.161.200	188.818.700
			Prosentase Desa dengan pningkatan nilai Indeks Ketahanan Ekonomi			
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	132.161.200	188.818.700
			Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi			
				KECAMATAN PARENGAN	130.520.750	188.461.350

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Prosentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi			
				KECAMATAN SOKO	127.540.150	214.450.150
			Persentase Desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi			
				KECAMATAN MERAKURAK	104.440.900	222.440.900
			persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi (%)			
				KECAMATAN RENGEL	118.031.650	161.546.650
			Persentase desa dengan peningkatan nilai ketahanan ekonominya			
				KECAMATAN SEMANDING	1.921.936.708	1.994.095.900
			Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi			
				KECAMATAN TUBAN	7.839.656.942	7.839.649.369
			Presentase desa dengan Peningkatan Nilai Ketahanan Ekonomi			
				KECAMATAN TUBAN	2.005.440.850	2.005.440.618
			" Presentase usulan hasil musrenbang kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan"			
				KECAMATAN TUBAN	843.585.281	843.585.281
			Presentase usulan hasil musrenbang kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan			
				KECAMATAN TUBAN	6.314.756.961	6.314.749.388
			Presentase usulan hasil Musrenbang kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan			
				KECAMATAN TUBAN	2.686.755.550	2.686.755.318
			Prosentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi			
				KECAMATAN PLUMPANG	110.000.000	168.020.000
			Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi			
				KECAMATAN PALANG	164.378.000	202.018.000
			Presentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi			
				KECAMATAN PALANG	729.014.700	728.864.700
			Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi			
				KECAMATAN WIDANG	112.581.500	169.701.500
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti			
				KECAMATAN JATIROGO	74.294.700	132.314.700
				KECAMATAN BANGILAN	16.715.400	45.725.400
				KECAMATAN BANCAR	163.041.100	307.891.100
			Prosentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti			
				KECAMATAN SENORI	45.359.000	45.359.000
			Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti			
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	83.258.200	605.438.200
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti			
				KECAMATAN PARENGAN	50.333.500	108.274.100
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti			
				KECAMATAN SOKO	61.970.000	148.880.000
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti			
				KECAMATAN MERAKURAK	70.383.850	128.383.850

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				KECAMATAN RENGEL	35.240.150	93.260.150
			Persentase pengaduan gangguan tratibum yang ditindaklanjuti			
				KECAMATAN SEMANDING	72.572.000	130.592.000
			Presentase Pengaduan gangguan trantibum yang di tindak lanjuti			
				KECAMATAN TUBAN	117.093.800	168.800.000
			Prosentase Pengaduan Gangguan Trantibum yang ditindak lanjuti			
				KECAMATAN PLUMPANG	66.450.000	124.470.000
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti			
				KECAMATAN PALANG	52.160.000	102.250.000
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti			
				KECAMATAN WIDANG	43.578.000	270.562.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani			
				KECAMATAN SENORI	8.346.500	8.346.500
			Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Di tindak Lanjuti			
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	49.732.000	49.732.000
			Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani			
				KECAMATAN TUBAN	13.718.000	2.720.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu			
				KECAMATAN JATIROGO	139.407.100	216.474.100
				KECAMATAN BANGILAN	134.066.000	152.081.000
				KECAMATAN BANCAR	148.683.000	264.917.000
				KECAMATAN SENORI	131.873.500	233.258.500
			Presentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			
				KECAMATAN TAMBAKBOYO	45.102.000	45.102.000
			Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu			
				KECAMATAN PARENGAN	99.998.300	186.909.200
			Prosentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu			
				KECAMATAN SOKO	119.157.150	206.067.150
			Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu			
				KECAMATAN MERAKURAK	83.195.850	184.710.850
				KECAMATAN RENGEL	137.542.000	224.572.000
			Persentase desa yang menetapkan APBDes yang tepat waktu			
				KECAMATAN SEMANDING	243.797.500	301.817.500
			Presentase Desa yang menetapkan APBDes tepat Waktu			
				KECAMATAN TUBAN	478.370.900	545.138.300
			Jumlah Desa yang difasilitasi			
				KECAMATAN PLUMPANG	138.950.000	225.980.000
			Persentase Desa Yang menetapkan APBDes yang tepat waktu			
				KECAMATAN PALANG	188.928.500	259.603.500

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu			
				KECAMATAN WIDANG	140.758.850	105.408.850
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
			Presentase peningkatan masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	144.530.000	144.530.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
			Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti			
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	464.046.000	464.046.000

LAMPIRAN 2.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1. Peningkatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, untuk Layanan Dasar dan untuk Peningkatan Lingkungan yang Berketahanan Bencana**							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Presentasi pemenuhan sarana dan prasarana sesuai rencana				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.270.400.000	5.544.998.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	139.500.000	230.850.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di wilayah kewenangan Kabupaten/Kota				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.799.000.000	49.867.932.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Presentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan Regional untuk menunjang tingkat layanan yang telah direncanakan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	80.940.000	80.940.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	650.000.000	650.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	97.475.485.117	219.671.030.237	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	100.216.400	812.401.630	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.400.000	32.180.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Pelanggaran Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	813.318.965	893.370.350	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.720.518.300	1.105.265.750	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	813.318.965	893.370.350	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Ketepatan waktu tanggap bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000	150.640.000	
				Prosentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000	150.640.000	
				Prosentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000	150.640.000	
				Prosentase wilayah dengan kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000	150.640.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	24.127.621.986	20.095.814.195	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				persentase penyelesaian dokumen lingkungan yang diamanatkan PUU LH				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	343.793.000	439.962.150	
				Persentase penyelesaian dokumen lingkungan yang diamanatkan PUU LH				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	1.228.326.250	1.613.226.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Luas kawasan KEHATI yang dikelola				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN	30.328.986.400	15.134.929.900	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					PERHUBUNGAN			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	23.850.000	23.850.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				persentase persetujuan lingkungan yang diselesaikan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	159.142.050	166.782.050	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Jumlah Lembaga yang peduli dan Berbudaya Lingkungan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	776.649.000	852.852.500	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	101.952.600	86.672.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	18.687.550.040	18.961.550.040	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (Ratio/Ruas Jalan)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	14.965.500	14.965.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	15.972.895.271	12.897.815.274	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Prosentase Koperasi Sehat				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	65.190.000	65.190.000	
				Rasio Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	65.190.000	65.190.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Prosentase SDM Koperasi Yang Berkualitas				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	670.460.000	340.501.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Prosentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	183.724.000	183.724.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	364.352.450	735.643.750	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Prosentase Usaha Mikro Yang Meningkat Menjadi Wirausaha				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	420.219.854	421.149.803	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	27.000.000	43.350.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap kabupaten/kota				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	7.008.249.250	7.168.244.250	
				Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	7.008.249.250	7.168.244.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten/kota				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.221.041.450	2.415.210.650	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Jumlah Kawasan yang Dipantau				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	117.512.700	117.512.700	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.449.297.520	2.450.715.220	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Persentase sarana pertanian yang digunakan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	91.236.500	91.236.500	
				Persentase sarana pertanian yang digunakan sesuai standar				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.649.283.529	4.518.911.529	
				Persentase sarana ppertanian yang digunakan sesuai standar				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	91.236.500	91.236.500	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sebelum Dipotong				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.375.282.950	6.619.587.806	
				Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sesudah Dipotong				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.375.282.950	6.619.587.806	
				Persentase prasarana pertanian yang digunakan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.375.282.950	6.619.587.806	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.842.773.640	1.301.027.470	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase fasilitasi penanggulangan bencana				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	570.711.500	570.711.500	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	46.800.000	46.800.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase kelompok tani kelas utama				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.172.717.000	2.972.717.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang layak fungsi				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	3.467.245.980	4.139.177.730	
				Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	3.467.245.980	4.139.177.730	
				Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	3.467.245.980	4.139.177.730	
				Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran/Dasaran				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	3.467.245.980	4.139.177.730	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Perkembangan Rata-rata harga 21 Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	377.198.900	387.199.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	267.157.000	267.157.000	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	305.740.000	305.740.000	
				Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	305.740.000	305.740.000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan administrasi pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH	410.000.000	232.070.350	
				Persentase rumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian dan sumber daya alam				
					SEKRETARIAT DAERAH	410.000.000	232.070.350	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.959.288.000	1.148.383.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Akip Perangkat Daerah				
					KECAMATAN MONTONG	36.000.000	36.000.000	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					KECAMATAN SOKO	28.819.800	28.819.800	
				Nilai Akip Perangkat Daerah				
					KECAMATAN JENU	1.675.800	1.675.800	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**2. Penguatan Berkelanjutan Reformasi Struktural Perekonomian yang Berketahanan, Berdaya, dan Bernilai Tambah**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	27.555.984.579	25.469.370.345	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Rasio luas derah irigasi kewenangan kab./kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.990.516.120	37.118.151.954	
				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS di wilayah kewenangan Kabupaten/Kota				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.297.275.047	20.281.430.055	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13.622.128.834	3.134.280.634	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Penyedotan Kakus				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.152.055.000	9.237.392.400	
				Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.152.055.000	9.237.392.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase saluran drainase lingkungan permukiman dalam konsisi baik				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.776.323.486	37.792.702.900	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase peningkatan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	501.755.000	6.163.981.000	
				Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	501.755.000	6.163.981.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Jumlah dokumen perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kabupaten/Kota				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.005.459.164	28.892.418.964	
				Persentase pembangunan bangunan yang sesuai dengan perencanaan/ketentuan RTH				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.005.459.164	28.892.418.964	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	92.236.749.000	228.255.383.712	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.626.547.350	1.542.989.960	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.876.650	232.142.500	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.450.000.000	7.506.958.500	
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/kota yang ditangani infrastrukturnya				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN	4.450.000.000	7.506.958.500	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di luar kawasan kumuh				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.000.000	25.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas)				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	180.709.931.798	213.777.802.798	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.718.330.571	10.356.339.077	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Poin)				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.911.330.512	4.852.059.424	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Pelanggaran Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4.469.305.515	4.379.946.685	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	65.217.000	65.217.000	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4.469.305.515	4.379.946.685	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Ketepatan waktu tanggap bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.738.622.545	2.875.733.979	
				Ketepatan waktu tanggap pasca bencana				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	920.040.000	1.012.311.000	
				Prosentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.658.662.545	3.888.044.979	
				Prosentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.658.662.545	3.888.044.979	
				Prosentase wilayah dengan kesiapsiagaan bencana yang sesuai standar				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.658.662.545	3.888.044.979	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.071.669.370	1.286.669.370	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase ketersediaan pangan masyarakat				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	520.981.398	659.975.398	
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI					
				Prosentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya datas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000	0	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Penangan sengeketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000	10.470.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	4.983.351.700	11.289.990.450	
				Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (Ratio/Ruas Jalan)				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	55.178.820.241	94.979.919.081	
				Prosentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	624.140.400	886.517.250	
				Rasio Konektivitas Kab/Kota				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	498.754.500	5.826.449.400	
				V/C rasio				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	624.140.400	886.517.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Persentase Kapal yang Memiliki Pas Kapal				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	27.530.000	27.530.000	
				Persentase Kapal Yang Memiliki Pas Kapal				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	27.530.000	27.530.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sebelum Dipotong				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	17.955.050.927	16.098.873.812	
				Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemeriksaaan Hewan Sesudah Dipotong				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	17.955.050.927	16.098.873.812	
				Persentase prasarana pertanian yang digunakan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	17.955.050.927	16.098.873.812	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	32.642.500	32.642.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Industri Kecil dan Menengah)				
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	129.362.100	150.212.100	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur Kewilayahan (PSDAIK) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.018.541.000	795.130.700	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Jumlah inovasi yang dihasilkan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	165.025.000	157.715.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Dana yang dibutuhkan				
					KECAMATAN JENU	54.749.400	62.185.800	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Nilai Akip Perangkat Daerah				
					KECAMATAN JENU	156.009.080	181.743.820	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Prosentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi				
					KECAMATAN SOKO	127.540.150	214.450.150	
3	**3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia melalui Penyelenggaraan Layanan Dasar, Peningkatan Ketrampilan Teknis Pelaku Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta Perlindungan Sosial yang produktif**							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai				
					DINAS PENDIDIKAN	3.098.999.950	5.760.962.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah				
					DINAS PENDIDIKAN	1.471.497.150	1.471.497.150	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
					DINAS PENDIDIKAN	1.471.497.150	1.471.497.150	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar				
					DINAS PENDIDIKAN	1.471.497.150	1.471.497.150	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan				
					DINAS PENDIDIKAN	1.471.497.150	1.471.497.150	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.635.806.408	3.400.468.574	
				Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.635.806.408	3.400.468.574	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka Kematian Bayi(AKB)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.049.034.485	38.923.431.384	
				Angka Kematian Ibu (AKI)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.049.034.485	38.923.431.384	
				Persentase balita stunting				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.049.034.485	38.923.431.384	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase desa ODF				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.049.034.485	38.923.431.384	
				Persentase fasyankes terakreditasi				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.049.034.485	38.923.431.384	
				Persentase Keluarga Sehat				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.049.034.485	38.923.431.384	
				Presentasi pemenuhan sarana dan prasarana sesuai rencana				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.143.044.000	6.358.895.089	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)				
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.116.597.500	1.123.679.000	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)				
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	419.160.500	419.160.500	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.416.000.000	1.425.000.000	
				Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.279.853.000	432.800.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	5.000.000	5.000.000	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.636.127.343	6.475.238.197	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	328.500.000	475.800.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Persentase calon investor yang merealisasikan penanaman modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	625.400.000	625.400.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan telah sesuai ketentuan teknis dan SOP				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	564.336.500	411.018.000	
				Persentase peningkatan retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	564.336.500	411.018.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Cakupan pengendalian pelaku usaha				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	416.065.250	416.065.250	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Presentase jumlah pemohon ijin atau calon investor yang memanfaatkan data dan sistem informasi penanaman modal				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	166.495.000	172.787.500	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	2.465.792.400	393.489.400	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Presentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Olahraga				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	5.409.174.700	7.940.562.700	
				Presentase Peningkatan Prestasi Olahraga				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	5.409.174.700	7.940.562.700	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Presentase Organisasi Kepramukaan (Gugus depan) yang meningkat kapasitasnya				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	2.064.654.800	2.149.654.700	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah kebudayaan daerah yang dikelola (objek)				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.573.325.800	1.321.212.800	
				Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	266.400.000	266.400.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Persentase peningkatan jumlah pelaku kesenian daerah (%)				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	211.750.000	211.750.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Meningkatnya Jumlah Dokumen Sejarah yang Terinventarisir				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	97.000.000	97.000.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	83.450.000	83.450.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP perangkat daerah				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.766.000	6.766.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Prosentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	24.086.000	24.086.000	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Prosentase Kenaikan Nilai Produk Lokal yang difasilitasi Pemasarannya				
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	338.948.944	338.948.944	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Penjabaran Program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.089.917.000	782.833.750	
4	**4. Perwujudan Kualitas dan Kinerja ASN Sesuai Tuntutan Ekologis Struktur yang Sederhana, Tata Kelola yang Terintegrasi Berbasis**							

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Elektronik, Dan Transformasi Pelayanan yang Adaptif							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS PENDIDIKAN	688.266.886.757	584.371.661.459	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah				
					DINAS PENDIDIKAN	236.337.057.940	250.438.394.349	
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
					DINAS PENDIDIKAN	236.337.057.940	250.438.394.349	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar				
					DINAS PENDIDIKAN	236.337.057.940	250.438.394.349	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan				
					DINAS PENDIDIKAN	236.337.057.940	250.438.394.349	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Prosentase peningkatan pengembagan Kurikulum Muatan Lokal				
					DINAS PENDIDIKAN	272.834.000	147.231.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan				
					DINAS PENDIDIKAN	330.257.000	330.257.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	71.836.084.224	68.078.219.018	
				Nilai AKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	26.627.410.713	24.464.777.759	
				Persentase indikator Mutu Nasional RS (RS Dr. R. Koesma)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	165.791.010.000	224.840.967.146	
				Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	46.148.297.775	61.027.633.960	
				Persentase Puskesmas dengan Kinerja Baik				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	46.148.297.775	61.027.633.960	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Angka Kematian Bayi(AKB)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	95.116.488.312	87.883.280.431	
				Angka Kematian Ibu (AKI)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	95.116.488.312	87.883.280.431	
				Indikator Mutu Nasional RS				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.044.700.000	8.179.245.000	
				Persentase balita stunting				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	95.116.488.312	87.883.280.431	
				Persentase desa ODF				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	95.116.488.312	87.883.280.431	
				Persentase fasyankes terakreditasi				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	95.116.488.312	87.883.280.431	
				Persentase Keluarga Sehat				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	95.116.488.312	87.883.280.431	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standard (RSUD dr. R. Koesma)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.559.004.468	16.559.004.468	
				Presentase yankes yang terakreditasi				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.044.700.000	8.179.245.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase fasyankes dengan tenaga kesehatan sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.887.771.900	2.377.534.600	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Memenuhi Syarat				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	544.172.950	515.245.450	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	493.648.750	793.818.571	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.682.537.057	7.596.272.929	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	463.737.350	625.338.300	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.330.888.492	8.523.042.476	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.691.829.150	16.793.053.007	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	161.849.000	161.849.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten yang Terpelihara				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN	60.431.700	60.431.700	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				0PersentaseKegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja				
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	41.202.000	114.805.050	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Prosentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	4.546.426.900	5.497.418.429	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota (%)				
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	524.547.950	489.221.600	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	349.237.600	393.257.600	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Rasio kekerasaan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	158.460.000	232.459.200	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Persentase pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	45.551.000	53.351.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	307.904.000	463.150.200	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN	364.162.400	310.696.200	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	155.743.200	111.950.000	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase ketersediaan pangan masyarakat				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	381.040.000	247.046.000	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase desa tahan pangan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	68.582.600	137.582.600	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase keamanan pangan				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	153.636.350	153.636.350	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.492.190.396	9.041.846.891	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Perekaman KTP elektronik				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	108.000.000	108.000.000	
				Perekaman KTP Elektronik				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.631.926.000	3.925.594.800	
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.739.926.000	4.033.594.800	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				''Kepemilikan akta kelahiran				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	225.324.100	196.844.100	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	136.583.150	117.583.150	
				persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	609.083.050	806.023.050	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Persentase Penyajian Data Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	52.725.000	52.725.000	
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Persentase Desa yang statusnya meningkat				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150.000.000	119.820.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Persentase Peningkatan Kerjasama Desa				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	124.450.000	200.000.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang telah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.386.256.300	8.216.791.550	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Prosentase Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan				
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.273.743.900	1.309.683.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.450.396.794	1.343.599.294	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				ANGKA KELAHIRAN TFR (TOTAL FERTILITY RATE)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	640.947.500	522.846.500	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	930.000.000	
				Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	578.795.000	4.111.159.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita 25-49 tahun				
					DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.653.672.000	6.301.100.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	775.001.050	862.076.050	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Peningkatan Prestasi Olahraga				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	749.785.000	8.139.925.000	
				Presentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Tempat Olahraga				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	3.550.240.310	11.127.995.560	
				Presentase Peningkatan Prestasi Olahraga				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	2.800.455.310	2.988.070.560	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Jumlah museum yang dikelola				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	801.400.000	801.400.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP perangkat daerah				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.885.926.692	6.903.768.871	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.345.449.900	1.345.449.800	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Tingkat Arsip Inaktif dan Statis yang diolah				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.049.783.200	1.247.522.300	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	113.041.600	113.041.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	94.102.500	205.355.500	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.293.900.000	2.230.700.000	
				Prosentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.293.900.000	2.230.700.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	597.425.000	793.425.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	408.331.400	324.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.731.240.000	2.172.240.000	
				Prosentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi				
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	1.731.240.000	2.172.240.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	28.134.305.008	21.086.128.690	
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	4.970.922.733	4.625.271.256	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase Unit Usaha IKM yang Meningkat Skala Usahanya (%)				
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1.760.723.700	5.102.128.119	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Persentase Calon Transmigran yang ditempatkan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	168.333.200	135.317.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	181.999.750	250.999.750	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Penjabaran Program dalam RPJMD ke dalam Program RKPD				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.754.031.500	2.361.028.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	92.557.550	113.207.550	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Prosentase ASN dengan Evaluasi Kinerja Optimal				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.000.000	28.000.000	
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar % (PNS tidak termasuk Guru dan Kesehatan)				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	75.000.000	75.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Kesehatan)				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.612.567.800	2.537.673.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					KECAMATAN JATIROGO	2.855.390.677	2.603.959.194	
					KECAMATAN BANGILAN	28.819.000	37.219.000	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					KECAMATAN BANCAR	13.500.000	118.404.800	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					KECAMATAN SENORI	14.500.000	23.250.000	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					KECAMATAN TAMBAKBOYO	2.832.244.275	2.247.358.822	
					KECAMATAN KEREK	12.300.000	18.250.000	
					KECAMATAN SOKO	3.034.487.968	2.663.631.608	
				0NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH				
					KECAMATAN MERAKURAK	46.959.440	62.039.740	
				Nilai AKIP Perangkat				
					KECAMATAN SEMANDING	63.101.280	143.321.840	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah				
					KECAMATAN PLUMPANG	222.281.350	323.231.250	
					KECAMATAN PALANG	3.792.474.399	3.250.139.204	
				Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah				
					KECAMATAN WIDANG	312.891.230	378.975.195	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Prosentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik				
					KECAMATAN TAMBAKBOYO	12.745.000	12.745.000	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kecamatan (PATEN)				
					KECAMATAN SOKO	16.800.000	89.225.000	
				Presentase Penyelesaian atas Permohonan Pelayanan Publik Kecamatan				
					KECAMATAN WIDANG	11.802.970	11.802.970	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Presentase Desa Mengisi Buku Administrasi Keuangan Desa Sesuai dengan Ketentuan0				
					KECAMATAN TAMBAKBOYO	132.161.200	188.818.700	
				Presentase Desa yang memiliki BUMDes				
					KECAMATAN TAMBAKBOYO	132.161.200	188.818.700	
				Prosentase Desa dengan pningkatan nilai Indeks Ketahanan Ekonomi				
					KECAMATAN TAMBAKBOYO	132.161.200	188.818.700	
				Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi				
					KECAMATAN WIDANG	112.581.500	169.701.500	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti				
					KECAMATAN TAMBAKBOYO	83.258.200	605.438.200	
				Persentase Pengaduan gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti				
					KECAMATAN KEREK	54.696.650	54.696.650	
				Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti				
					KECAMATAN SOKO	61.970.000	148.880.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti				
					KECAMATAN MERAKURAK	70.383.850	128.383.850	
					KECAMATAN WIDANG	43.578.000	270.562.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Prosentase Pengaduan Masyarakat yang Di tindak Lanjuti				
					KECAMATAN TAMBAKBOYO	49.732.000	49.732.000	
				Dana yang dibutuhkan				
					KECAMATAN JENU	81.500.000	81.500.000	
				Nilai Akip Perangkat Daerah				
					KECAMATAN JENU	81.500.000	81.500.000	
				Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani				
					KECAMATAN TUBAN	13.718.000	2.720.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Prosentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu				
					KECAMATAN SOKO	119.157.150	206.067.150	
				Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu				
					KECAMATAN WIDANG	140.758.850	105.408.850	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.500.000	22.600.000	

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Akibat terjadinya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, tahun 2023 diharapkan menjadi tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Dalam perspektif yang lebih luas, tantangan Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi Nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang. Maka Tema RKP pada tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan tema diatas, arah kebijakan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2023 adalah:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas SDM; kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain; air bersih dan sanitasi.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Adapun Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
   a. Sistem Jaminan Sosial.
   b. Modernisasi Pertanian.
   c. Pemerataan Pembangunan.
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan.
   a. Sistem Kesehatan.
   b. Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter).

3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job.
   a. Penyediaan lapangan usaha.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
   a. Revitalisasi pariwisata.
   b. Pengembangan UMKM.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
   a. Industrialisasi.
   b. Riset dan Inovasi.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).
   a. Ekonomi rendah karbon.
   b. Transisi energy.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi.
   a. Penyediaan air bersih dan sanitasi.
   b. Infrastruktur Digital.
   c. Infrastruktur Konektivitas.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
   a. Fasilitas dasar di IKN.

Selain itu dengan tema tersebut, terdapat 7 prioritas Nasional yang mendukung, diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukanham dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan dan prioritas tersebut diatas ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran dan asumsi makro Nasional tahun 2023 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,4 – 6,0 persen;
2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 2,0 - 4,0;
3. Rata-rata suku bunga SBN 10 tahunan diperirakan sebesar 5,98 - 8,07 % ;
4. Rata-rata nilai tukar Rupiah sebesar Rp 13.900 - 14.700 (USD/IDR);
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran 60 - 70 USD per barel;
6. Lifting Minyak Bumi diperkirakan 636 - 735 ribu barel per hari;
7. Lifting Gas diperkirakan 1.232 - 1.341 ribu barel per hari.
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5 – 6,3 persen;
9. Tingkat Kemiskinan ditetapkan sebesar 8,5 – 90 persen;
10. Indeks Gini Ratio disepakati 0,376 - 0,378;
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disepakati 73,41 - 73,46;
12. Nilai Tukar Petani (NTP) disepakati 103 – 105;
13. Nilai Tukar Nelayan (NTN) disepakati 104 – 106.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 adalah **"**Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro", dengan prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local.
5. Peningkatan dan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energy.
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Adapun yang menjadi sasaran dan asumsi makro provinsi Jawa Timur tahun 2023 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi 3,42 - 5,12;
2. Indeks Theil 0,32040 - 0,31463;
3. Persentase Penduduk Miskin 10,96 - 10,39;
4. Indeks Gini 0,3682 – 0,3677;
5. Indeks Pembangunan Gender 90,92 - 91,87;
6. Indeks Pembangunan Manusia 72,58 - 73,07;
7. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 5,42 - 3,83;
8. Indeks Reformasi Birokrasi 77,76 - 78,71;
9. Indeks Kesalehan Sosial 66,38 - 69,14;
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,35 - 64,40;
11. Indeks Risiko Bencana 117,26 - 116,26.

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan Anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi Masyarakat saat ini dalam penyusunan Perubahan APBD tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya memenuhi beberapa hal: (1) menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki Masyarakat; (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di Daerah.

Perubahan APBD memang bukan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan Daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di Daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan Daerah baik pendapatan maupun penerimaan Pembiayaan Daerah serta Belanja Daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

Melihat perkembangan yang terjadi dalam semester awal tahun 2023 dan menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan penyesuaian APBD melalui mekanisme Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat ke Daerah, maka apabila terjadi perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam Kebijakan Umum APBD, konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendekatan dengan menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan target sasaran dan asumsi dasar makro daerah yang harus dicapai sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,32 - 4,42%;
b. Tingkat Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 1 - 2;
c. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) sebesar 0,310 - 0,345;
d. Indeks Williamson sebesar 0,942 - 0,970;
e. Tingkat Kemiskinan diproyeksikan sebesar 14,50;
f. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,0%.;
g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,70;
h. Indeks Pembangunan Gender sebesar 88,27;
i. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 61,61;
j. Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability Index) sebesar 75,13;
k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sebesar 78,00;
l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,70;
m. Indeks Resiko Bencana sebesar 133.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan Daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan Daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan Daerah dengan menggali potensi sumber Pendapatan Daerah yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi Daerah desentralisasi keuangan, Daerah dapat membiayai pembangunan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan Masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada Masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu perolehan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Perimbangan lainnya.

Dengan kondisi pasca pandemi, dimana pertumbuhan ekonomi belum dapat dicapai secara optimal, terjadinya penurunan pendapatan sudah dapat dipastikan baik yang dipastikan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer. Namun berbagai upaya tetap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban guna mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Daerah untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Tuban. Dari sisi pendapatan, jika dibandingkan proyeksi pada APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp60.466.402.001,00 atau 1,97% menjadi Rp3.123.127.623.303,00 dari sebelumnya Rp3.062.661.221.302,00. Dari kelompok PAD mengalami penurunan sebesar (3,94%) atau sebesar Rp24.192.712.129,00 dari target yang dipasang sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp614.216.846.502,00 menjadi Rp590.024.134.373,00.

Penurunan terutama dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang merupakan sumber penerimaan terbesar dari sektor Pajak Daerah. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan kapasitas produksi Pabrik Semen yang ada di Tuban dan BPHTB. Sedangkan pada sisi Retribusi Daerah direncanakan naik sebesar 26,14% atau senilai sebesar Rp5.955.591.559,00 menjadi sebesar Rp28.737.829.761,00 dari yang semula dianggarkan sebesar Rp22.782.238.202,00. Pada sisi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun (3,86%) dari semula sebesar Rp19.283.189.500,00 menjadi sebesar Rp18.539.063.996,00 sedangkan pada Lain-lain PAD yang Sah direncanakan naik 6,53% atau sebesar Rp14.899.961.816,00 dari sebesar Rp228.002.518.800,00 menjadi sebesar Rp242.902.480.616,00.

Dari Kelompok Pendapatan Transfer terdapat kenaikan target dari Dana Bagi Hasil, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan karena DAU Tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian PPPK sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 disalurkan dengan sistem *reimbuse*, begitupun juga halnya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami penurunan menyesuaikan hasil *desk* dengan Kementerian/Lembaga teknis. Dari pos Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan, yang berasal Dana Bagi Hasil Pajak maupun Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur yang pada tahap APBD belum dianggarkan.

Komposisi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 masih didominasi dari penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer. Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah terutama dari PAD maupun Pendapatan Transfer, sebagai berikut:

a) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:
   (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset Daerah ataupun kerjasama dengan Pihak Ketiga.
   (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
   (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi Pajak maupun Retribusi Daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah,

rasionalisasi Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan Dunia Usaha serta Masyarakat.

(4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Pendapatan Lain-lain yang Sah dan PBB serta Pajak Propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan Pendapatan Daerah.

(5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek Pajak (PBB dan Pajak Lainnya).

(6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, dan OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas Pajak dan Retribusi Daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh Petugas pada Sektor-Sektor Penghasil;

d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.

e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola.

f) Peningkatan SDM dan cara menugaskan Aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi Petugas Pajak.

g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada Petugas Pemungut dan Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;

h) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;

i) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi terkait dengan alokasi Dana Perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

j) Melakukan *updating* data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kememterian Keuangan sebagai Institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Tuban bisa optimal.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

Estimasi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.123.127.623.303,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp60.466.402.001,00 atau 1,97% dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp3.062.661.221.302,00, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	590.024.134.373,00
2.	Pendapatan Transfer	Rp	2.532.326.456.930,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	777.032.000,00
	Jumlah	**Rp**	**3.123.127.623.303,00**

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2023 Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENDAPATAN DAERAH	**3.062.661.221.302,00**	**3.123.127.623.303,00**	**60.466.402.001,00**	**1,97**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**614.216.846.502,00**	**590.024.134.373,00**	**(24.192.712.129,00)**	**(3,94)**
Pajak Daerah	344.148.900.000,00	299.844.760.000,00	(44.304.140.000,00)	(12,87)
Retribusi Daerah	22.782.238.202,00	28.737.829.761,00	5.955.591.559,00	26,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.283.189.500,00	18.539.063.996,00	(774.125.504,00)	(3,86)
Lain-lain PAD yang Sah	228.002.518.800,00	242.902.480.616,00	14.899.961.816,00	6,53
PENDAPATAN TRANSFER	**2.447.667.342.800,00**	**2.532.326.456.930,00**	**84.659.114.130,00**	**3,46**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.295.513.517.800,00**	**2.327.875.916.954,00**	**32.362.399.154,00**	**1,41**
Dana Perimbangan	1.996.412.621.800,00	2.028.775.020.954,00	32.362.399.154,00	1,62
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	517.757.170.800,00	607.847.727.167,00	90.090.556.367,00	17,40
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	993.838.054.000,00	961.028.054.000,00	(32.810.000.000,00)	(3,30)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	139.501.341.000,00	138.149.070.473,00	(1,352.270.527,00)	(0,97)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	345.316.056.000,00	321.750.169.314,00	(23.565.886.686,00)	(6,82)
Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	0
Dana Desa	299.100.896.000,00	299.100.896.000,00	0	0
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**152.153.825.000,00**	**204.450.539.976,00**	**52.296.714.976,00**	**34,37**
Pendapatan Bagi Hasil	152.153.825.000,00	194.362.085.700,00	42.208.260.700,00	27,74
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	152.153.825.000,00	194.362.085.700,00	42.208.260.700,00	27,74
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.290.996.000,00	47.311.400.000,00	13.020.404.000,00	37,97
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.270.862.000,00	24.085.000.000,00	5.814.138.000,00	31,82
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.254.760.000,00	62.435.087.700,00	23.180.327.700,00	59,05
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	251.009.000,00	444.400.000,00	193.391.000,00	77,05
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	60.086.198.000,00	60.086.198.000,00	0	0
Bantuan Keuangan	0,00	10.088.454.276,00	10.088.454.276,00	100,00
Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi	0,00	10.088.454.276,00	10.088.454.276,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**777.032.000**	**777.032.000**	**0**	**0**
Pendapatan Hibah	777.032.000	777.032.000	0	0

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya, serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi *Covid-19*. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan Anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan Anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, pelayanan Publik dan pertumbuhan ekonomi Daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan untuk Pemerintah Pusat *(mandatory spending),* antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Perubahan kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD antara lain disebabkan; **pertama** perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2023 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi Belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan Pemerintah, **kedua** terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan

jenis belanja dan **ketiga** karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan Anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar Masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Belanja Daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas Daerah (*money follow program*). Pengelolaan Belanja Daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dari Belanja Daerah dan bidang kesehatan (10%) dari Belanja Daerah diluar gaji. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan belanja untuk bidang pendidikan sebesar 23,40% dan alokasi belanja untuk bidang kesehatan sebesar 19,69%.
2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD dimana perhitungan diluar TPG, TKG dan Tamsil yang bersumber dari DAK, Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 23,86% dari Belanja Daerah.
3. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi Daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
   a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah.
   b. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
   c. Peningkatan daya saing Daerah dan perluasan lapangan kerja.
   d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas Anggaran Belanja Daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan Daerah.
5. Penentuan dan penggunaan Anggaran Belanja Daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi Belanja Operasi, Modal, Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.

6. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel.
7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Belanja Daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan Standar Harga Pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
8. Mendayagunakan penggunaan Belanja Daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi Sektor Swasta dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Daerah Kabupaten Tuban.
9. Untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 arah kebijakan belanja adalah memprioritaskan pembangungan atau perbaikan infrastruktur dalam kondisi rusak berat, diantaranya infrastruktur pendidikan, kesehatan, pendukung pemulihan ekonomi, dan konektivitas wilayah.
10. Sesuai dengan amanat Perundang-undangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan 40% dana Hibah Pilkada Tahun 2024 kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Tuban di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp37.565.465.800,00.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Belanja Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp525.762.503.588,00 atau 16,43% dibanding APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dianggarkan sebesar Rp3.200.987.744.302,00 sehingga pada Perubahan APBD total Belanja Daerah menjadi sebesar Rp3.726.750.247.890,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.950.415.751.371,00:
   - Belanja Pegawai sebesar Rp1.058.185.923.656,00 turun sebesar (Rp141.934.416.625,00) atau (11,83%).
   - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp736.228.215.293,00 naik sebesar Rp90.885.902.563,00 atau 14,08%.
   - Belanja Hibah sebesar Rp148.108.447.811,00 naik sebesar Rp60.790.480.837,00 atau 69,62%.
   - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp7.893.164.611,00 turun sebesar (Rp172.355.881,00) atau (2,14%).
b. Belanja Modal sebesar Rp1.281.452.637.244,00 mengalami kenaikan sebesar Rp507.371.691.292,00 atau 65,55%.

c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.330.561.837,00 turun sebesar (Rp5.775.082.535,00) atau (57,15%).

d. Belanja Transfer sebesar Rp490.551.297.438,00 bertambah sebesar Rp14.596.283.937,00 naik 3,07% dengan rincian:

- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp33.519.826.000,00 turun sebesar (Rp3.334.291.501,00) atau (9,05%) dari pagu awal APBD Tahun Anggaran 2023, menyesuaikan perubahan target Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun Anggaran 2023 dan pelampauan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp457.031.471.438,00 naik sebesar Rp17.930.575.438,00 atau 4,08% dari penganggaran kembali SiLPA Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 dan adanya kenaikan Dana Transfer Umum.

6.1. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit Anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit Anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan Daerah yang semakin meningkat.

Pengelolaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah maupun Sisa Penghematan Belanja;
2) Peningkatan manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp603.622.624.587,00 naik 336,38% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp138.326.523.000,00 yang terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp673.622.624.587,00 yang berasal dari SiLPA Audited Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp673.567.124.587,00 dan Penerimaan Kembali Pemeberian Pinjaman sebesar Rp55.500.000,00.
b) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp70.000.000.000,00 direncanakan Pembentukan Dana Cadangan untuk pembiayaan Pilkada serentak tahun 2024.

Sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp603.622.624.587,00 untuk menutup Defisit Belanja.

Secara lebih lebih lengkap Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

URAIAN	APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)	Tambah/Kurang	
			Rp	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**208.326.523.000,00**	**673.622.624.587,00**	**465.296.101.587,00**	**223,35%**
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	208.271.023.000,00	673.567.124.587,00	465.296.101.587,00	223,41%
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00%
Penerimaan piutang daerah				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**70.000.000.000,00**	**70.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Pembentukan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00%
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**138.326.523.000,00**	**603.622.624.587,00**	**465.296.101.587,00**	**336,38%**

Tema pembangunan Kabupaten Tuban pada RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

"Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Seutuhnya yang Didukung dengan Kuaalitas Infrasatruktur untuk Reformasi Ekonomi Berkelanjutan"

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2023 adalah:

1. Prioritas 1. Peningkatan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, untuk layanan dasar dan untuk peningkatan lingkungan yang berketahanan bencana.
2. Prioritas II. Penguatan berkelanjutan reformasi struktural perekonomian yang berketahanan, berdaya dan bernilai tambah.
3. Prioritas III. Peningkatan kualitas pembangunan Manusia melalui Penyelenggaraan layanan dasar, peningkatan keterampilan teknis Pelaku Ekonomi dan Ketenagakerjaan serta perlindungan sosial yang produktif.
4. Prioritas IV. Perwujudan kualitas dan kinerja ASN sesuai tuntutan ekologis struktur yang sederhana, tata kelola yang terintegrasi berbasis elektronik, dan tranformasi pelayanan yang adaptif.

Untuk pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam setengah paruh pertama pelaksanaan pembangunan di Tahun 2023, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Strategi dan upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah
   a. Pendapatan Asli Daerah
      1) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan potensi pungutan;
      2) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM Aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
      3) Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

penentuan besaran Pajak Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.

4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

b. Dana Transfer

1) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;

2) Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan program prioritas Nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;

3) Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja Pemerintah Daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain peningkatan ekspor, kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

4) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target Belanja Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada Perubahan RKPD tahun 2023.

b. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
d. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
e. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
f. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan Nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan Masyarakat yang berfokus pada prinsip *money follows program* dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Diantarnya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti pula oleh perbaikan regulasi Nasional, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut di atas, maka Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sekaligus merupakan penjabaran dari penyesuaian terhadap target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 serta target makro ekonomi berdasarkan perkembangan kondisi terkini Tahun 2023, yang disesuaikan dengan kondisi obyektif dan proyeksi masa yang akan datang.

Tuban, 6 September 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN Selaku, PIHAK KEDUA	BUPATI TUBAN Selaku, PIHAK PERTAMA
H. M. MIYADI, S.Ag. MM KETUA	ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
SUGIANTORO, A.Md WAKIL KETUA	
ANDHI HARTANTO, S.Pd WAKIL KETUA	
IMAM SUTIONO, SH WAKIL KETUA	